BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap program pemerintah Kota Gorontalo dalam kehidupan masyarakat serta perkembangan yang ada didalam kota dengan adanya program kartu sejahtera ini

Kartu sejahtera adalah sebuah program pemerintah Kota Gorontalo yang menjadi program unggulan Kota. Dengan adanya kartu sejahtera ini masyarakat Kota Gorontalo yang berekonomi lemah dapat memperoleh pelayanan gratis di setiap sektor. Adapun pelayanan gratis yang diberikan pemerintah Kota adalah kesehatan gratis, kelahiran gratis, pengurusan akta dan KK, dan bahkan sampai dengan uang santunan duka setiap ada warga masyarakat meninggal sebesar dua juta rupiah.

Dari 8 program unggulan yang disediakan oleh pemerintah Kota Gorontalo didalam kartu sejahtera, masyarakat Kota khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Barat setiap Kknya hanya seinggunakan dua atau 3 program saja seperti pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis. Namun tidak sedikit juga yang sudah menggunakan kartu sejahtera dalam pengurusan UKM yang tergabung dengan beberapa kelompok. Namun karena adanya peraturan pemerintah pusat sehingganya pemerintah kota tidak lagi memberikan bantuan usaha secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan yang

diberikan dalam kartu sejahtera, hanya berfokus pada pemberian ijin usaha saja.

Secara garis besar berdasarkan hasil penelitian yang peneliti cantumkan didalam bab sebelumnya persepsi masyarakat terhadap program kartu sejahtera yang menjadi program unggulan masyarakat Kota Gorontalo, masyarakat sangat banyak yang meresponnya dengan baik. Terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai kartu sejahtera.

Menurut sebagian masyarakat, awalnya kartu sejahtera ini hanya diperuntukkan untuk pendukung Bapak Marten Taha dan Budi Doku (MADU) pada pilwako 2014 lalu. Namun seiring berjalannya waktu kartu sejahtera kemudian diperuntukkan bukan hanya pada pendukungnya saja, tetapi kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Karena sudah menjadi tanggung jawab sebagai pemimpin bukan hanya melayani pendukungnya saja tetapi masyarakatnya.

Hal ini juga terdapat pada Pasal 23-25 yang berbunyi : setiap manusia berhak atas perlindungan hari tua, cacat, sakit, meninggal dunia dan menganggur. Oleh sebab itu ILO (Internasional Labour Organization) menjabarkan hak-hak asasi ini dalam konversi ILO No. 102 Tahun 1952 yang intinya menyatakan bahwa standard minimum jaminan sosial adalah sakit, hamil, bersalin, hari tua, cacat, meninggal dunia, kecelakaan, menganggur dan tnjangan keluarga.

Berdasarkan UU ini maka masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan pelayanan yang merata untuk menunjang kesejahteraannya serta pemerintah wajib memfasilitator.

2. Saran

Saran saya sebagai peneliti agar program pemerintah kota ini bisa dipertahankan ataupun perlu ditingkatkan lagi dalam segi pelayanannya. Dan diharapkan pula seluruh aparat kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Barat harus perlu ditingkatkan lagi pelayanannya. Dan di harapkan setiap kelurahan itu bisa lebih mengontrol masyarakatnya dalam pemahaman terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah kota Gorontalo, agar program pemerintah yang sudah di buat dengan sebaik-baiknya bisa berjalan lancar dan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat kota gorontalo.

Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah disepakati, penyuluh/fasilitator akan menghadapi kesulitan dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Di lain pihak, tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan, dikhawatirkan proram pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan akan kurang bermanfaat, berbeda, atau bahkan mungkin bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada. Sehubungan dengan itu, beragam kebijakan, peraturan, dan hasil-hasil musyawarah yang harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Asna Aneta. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo.* vol 1 No. 1. Universitas Negeri Gorontalo.

BALAI IPTEKNET BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. 2010. *BANDA ACEH CYBER CITY (BACC)*. Kota Banda Aceh.

Dea Deviyanti,"Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah," *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 380-394.

Eko Digdoyo, S. Pd., M.Hum. 2015. ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR. Penerbit Ghalia Indonesi. Bogor.

Funco Tanipu. 2008. *Raut Muka Wajah Gorontalo Kita.* Intan Cendekia. Yogyakarta.

I Ketut Meniarta , Wawan Mas'udi , AAGN Ari Dwipayana. 2009. *Dinamika Sistem Kesejahteraan dan Modal Sosial di Masyarakat Banjar Pakraman-Bal.* Volume 13, Nomor 2, November 2009. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Janianton Damanik. 2011. *Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan.* Volume 15, Nomor 1. Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta.

John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixsed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Mardikanto Totok, Soebiato Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung.

Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.* Jakarta.

Makalah ilmu lingkungan oleh Putu Nopa Gunawan / D411 10 009

Niki Oktaviani Adam 2016. Skripsi. *Persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan.* Di puskesmas tamalate, kota gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.

Inawati lestari 2015. Skripsi. *Pengaruh program kartu sejahtera terhadap tingkat partisipasi masyarakat.* Universitas Negeri gorontalo.

Paulus Hariyono. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

RPJMD KOTA GORONTALO 2014-2019

Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Soetomo. 2011. *Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial.* Volume 15, Nomor 1. Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta.

Niki Oktaviani Adam, 2016, *persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan(studi penelitian di puskesmas tamalate, kota gorontalo),* Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial.

Michael Raper, 2008, *Negara Tanpa Jaminan Sosial*, Jakarta : Trade Union Rights Center.